

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Munculnya praktik manajemen dapat dijelaskan dengan teori keagenan. Masalah peraturan dapat menjelaskan mengapa manajemen secara sukarela mengungkapkan informasi. Dengan mengungkapkan informasi secara sukarela, manajemen mengakui bahwa kinerja dan aktivitas perusahaan terus dipantau oleh pemegang saham, dan memberikan pemegang saham yang terus berupaya mengoptimalkan kesejahteraan pemegang saham. Anda dapat memberikan kepercayaan diri pada aktivitas bisnis Anda. Pemegang saham memantau apakah manajer bertindak untuk kepentingan mereka. Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Anggraita (2012), masalah keagenan didefinisikan dalam kerangka teori keagenan sebagai konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, kontrak yang tidak sempurna, dan informasi antara prinsipal dan agen. asimetri dari Ketika memahami tata kelola perusahaan, perspektif agensi dapat digunakan sebagai pembenaran. Jensen dan Meckling (1976) (Wulandari, 2013) menyebut hubungan antara manajer (*agent*) dan investor (*principal*) sebagai hubungan keagenan. Ada konflik kepentingan, konflik antara manajer (*agen*) dan investor (*principal*), dan biaya broker. (Ujiyantho & Agus Pramuka, 2007) menyatakan bahwa manajer yang diberdayakan untuk mengarahkan perusahaan bertanggung jawab untuk memaksimalkan kepentingan prinsipal mereka dan melaporkan tanggung jawab mereka melalui media pelaporan keuangan. Biaya manajemen diberikan untuk kinerja manajer sesuai dengan kontrak yang disepakati. Oleh karena itu, terdapat dua kepentingan yang berbeda dalam perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kemakmuran yang diinginkan.

Sutedi (2011; 13-17) *Agency theory* merupakan salah satu pilar teori keuangan dan memberikan wawasan analitis yang memungkinkan kita untuk mempelajari pengaruh hubungan *agen-principal* atau *principal-principal*. Pengertian prinsipal dalam teori keagenan adalah pihak yang melepaskan sebagian atau seluruh aset untuk dikembangkan dan melepaskan sebagian atau seluruh aset untuk dikembangkan oleh pihak lain. Asumsi teori agensi adalah:

- a. Agen yang menerima surat kuasa dari prinsipal menggunakan kesempatan ini untuk keuntungan mereka.
- b. Individu memiliki pola pikir yang rasional sehingga mampu membangun ekspektasi yang tidak memihak terhadap implikasi masalah perilaku dan nilai manfaat yang diharapkan di masa depan. Pihak lain yang terkait langsung dapat dimasukkan dalam perhitungan kebutuhan pihak lain.

Asumsi teori keagenan menunjukkan bahwa ada semangat menuduh para pihak yang bekerja sama untuk merebut peluang mereka sendiri. Dalam hubungan agen *principal*, agen memanfaatkan peluang, dan dalam hubungan pemegang saham (*principal*)-pemberi pinjaman (*principal*), pemegang saham memanfaatkan hubungan tersebut. Konflik kepentingan memicu biaya keagenan. Biaya keagenan yang timbul dari konflik kepentingan antara direktur perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal) dapat menimbulkan jenis biaya keagenan berikut:

- a. Biaya akibat pengelolaan agen yang tidak efektif.
- b. Biaya yang timbul dari pemilihan berbagai proyek yang pemilihannya dilakukan oleh pemegang saham karena tingginya risiko kerugian.
- c. Biaya yang dihasilkan dari aktivitas pemantauan kinerja klien dan tindakan agen (biaya pemantauan).
- d. Biaya yang timbul dari pembatasan aktivitas keagenan klien (biaya obligasi).

Dalam hubungan keagenan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajer (*agen*), teori keagenan menunjukkan adanya tiga faktor lain yang dapat membatasi perilaku menyimpang dari manajer (*agen*). berfungsinya pasar tenaga kerja eksekutif, kedua, berfungsinya pasar modal. Ketiga, komponen manipulasi pasar berupa untuk menguasai, memiliki atau mengendalikan harta milik suatu perusahaan (*enterprise control market*). untuk menguasai, memiliki atau mengendalikan harta milik suatu perusahaan (*enterprise control market*).

Teori agensi, yang dikembangkan oleh Profesor Michael Johnson dari Universitas Harvard, melihat manajemen sebagai "*agen*" pemegang saham daripada sebagai pihak yang bijaksana, bijaksana dan adil bagi mereka, yang sepenuhnya menyadari kepentingan mereka sendiri, dan bertindak sesuai dengan itu. *Agency theory* cenderung mencerminkan realitas yang ada. Tata kelola perusahaan yang baik dikembangkan berdasarkan teori keagenan. Teori keagenan menuntut

manajemen untuk dipantau dan dikendalikan untuk memastikan bahwa itu sepenuhnya sesuai dengan berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

## 2. Konsep Sustainability Report

### a. Laporan *Sustainability*

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 40 Pasal 74 menyatakan bahwa perusahaan yang kegiatan usahanya di dalam dan berkaitan dengan sumber daya alam wajib memikul tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan peraturan ini, keberlanjutan di Indonesia terus tumbuh menurut *National Center for Sustainability Reporting (NCSR)*, namun jumlah perusahaan Indonesia yang menerbitkan laporan keberlanjutan masih tertinggal dari negara maju.

Pelaporan keberlanjutan adalah praktik mengukur, mengungkapkan, dan menjelaskan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal kinerja suatu organisasi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Puspowardhani, 2013). SR adalah bukti bahwa perusahaan memiliki kesepakatan tentang lingkungan sosialnya, dan hasilnya akan dievaluasi oleh mereka yang membutuhkan informasi tersebut. Lebih lanjut, SR merupakan salah satu alat yang dapat digunakan oleh perusahaan, baik pemerintah maupun bisnis dalam dialognya dengan warga dan pemangku kepentingan untuk melaksanakan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan SR saat ini sama pentingnya dengan pengungkapan yang dilakukan dalam laporan keuangan (Hanindito, 2014).

Menurut GRI (2006), laporan keberlanjutan menyediakan platform untuk mengkomunikasikan kinerja ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola organisasi, yang menunjukkan dampak positif dan negatif. Aspek yang dianggap penting bagi organisasi dan relevan dengan harapan dan kekhawatiran pemangku kepentingan mendukung pelaporan keberlanjutan. *Stakeholder* bukan hanya mereka yang berinvestasi dalam organisasi, tetapi juga mereka yang memiliki hubungan lain dengan organisasi. Laporan keberlanjutan membantu organisasi menetapkan tujuan, mengukur kinerja, dan mengelola perubahan. Laporan keberlanjutan harus mematuhi prinsip-prinsip *Global Reporting Index (GRI)*.

Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi adalah:

1. Berimbang

Laporan keberlanjutan dimaksudkan untuk mengungkapkan aspek positif dan negatif dari kinerja perusahaan untuk menilai kinerjanya secara keseluruhan.

2. Dapat dibandingkan

Laporan keberlanjutan yang berisi topik dan informasi yang ada harus dipilih, diedit dan dilaporkan secara seragam. Informasi ini harus disajikan secara cermat agar pemangku kepentingan dapat menganalisis perubahan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu.

3. Keakuratan

Informasi yang dimuat dalam Laporan Keberlanjutan harus cukup akurat dan rinci agar pemangku kepentingan dapat menilai kinerja perusahaan. Ketepatan waktu.

4. Laporan keberlanjutan harus tepat waktu dan informasi yang tersedia harus tersedia bagi pemangku kepentingan kapan pun dibutuhkan untuk pembuatan kebijakan.

5. Kepatuhan

Informasi dalam laporan keberlanjutan harus sesuai dengan pedoman dan dapat dipahami serta dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Stakeholder harus dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka butuhkan.

6. Tanggung Jawab

Informasi dan proses yang digunakan untuk menyusun laporan harus dikumpulkan, disusun, dianalisis dan diungkapkan dengan benar untuk menentukan kualitas dan pentingnya informasi yang terkandung dalam laporan keberlanjutan.

Standar pengungkapan yang harus dimasukkan dan terdapat dalam laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) menurut GRI (2006), antara lain:

1. Strategi dan Profil

Pengungkapan tentang strategi, profil, dan tata kelola organisasi yang berfungsi sebagai latar belakang yang lebih luas untuk menganalisis kinerjanya.

## 2. Pendekatan Manajemen

Pengungkapan yang menjelaskan bagaimana perusahaan menggunakan subjek tertentu untuk menempatkan kinerja dalam situasi tertentu dalam konteks.

## 3. Indikator Kinerja

Indikator yang menawarkan data perbandingan pada kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi.”

Ada banyak manfaat bagi perusahaan untuk membuat laporan keberlanjutan. Namun, masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mempublikasikan laporan keberlanjutan karena beberapa keterbatasan berikut (Witoelar, 2005; dalam Ratnasari, 2011)

Tidak wajib, pelaporan memerlukan kemauan politik yang kuat dan atas manajemen untuk menentukan kebijakan perusahaan.

Ukuran keuangan dapat diukur dengan menggunakan ukuran keuangan. Kinerja laporan keberlanjutan tidak dapat dihitung langsung dari aktivitas perusahaan. Belum ada kepastian bahwa peningkatan penjualan perusahaan merupakan akibat langsung dari kegiatan sosial perusahaan. Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan membuat indikator dampak aktivitas perusahaan. Metrik ini biasanya bersifat non-keuangan.

Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola mendefinisikan tata kelola perusahaan yang diadopsi oleh entitas bisnis untuk menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku didefinisikan sebagai proses dan struktur.

Menurut Widiyatmaja (2010), ada dua hal yang menjadi perhatian terkait *corporate governance*. Yang pertama adalah pentingnya hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu, dan yang kedua adalah kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang akurat dan tepat waktu secara transparan. Mekanisme tata kelola perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi laba

(Boediono, 2005). Kami ingin investor menerima informasi yang lebih akurat dan berguna untuk mengambil keputusan.

Komisi Nasional Kebijakan Governance menerbitkan Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia pada tahun 2006. Pedoman GCG merupakan panduan bagi perusahaan untuk mengembangkan, menerapkan, dan mengkomunikasikan praktik GCG kepada pemangku kepentingan. KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) menjabarkan prinsip-prinsip GCG dalam pedoman tersebut sebagai berikut:

#### 1. Transparansi (Transparency)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan stakeholder lainnya.

#### 2. Akuntabilitas (Accountability)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

#### 3. Responsibility (Responsibility)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

#### 4. Independensi (Independency)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

#### 5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)



Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Untuk menciptakan good corporate governance, perusahaan dapat melakukan beberapa tindakan, antara lain membentuk suatu dewan komisaris yang profesional dan independen serta dalam ukuran yang tepat, membentuk komite audit untuk membantu tugas dewan komisaris, dan memilih auditor yang profesional untuk mendeteksi adanya kecurangan dalam laporan keuangan.

Menurut Hiro menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang bertugas untuk membantu dewan pengawas organisasi dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas tugas auditor eksternal dan auditor internal. Di dalam perusahaan, komite audit sangat berguna untuk menangani masalah-masalah yang membutuhkan integrasi dan koordinasi sehingga dimungkinkan permasalahan-permasalahan yang signifikan atau penting dapat segera teratasi. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Arielleffendil menyatakan bahwa

Sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang beroperasi secara profesional dan independen memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan meningkatkan pengawasan Dewan Pengawas (atau Dewan Komisaris) atas pelaporan keuangan, manajemen risiko, audit, dan adopsi proses tata kelola perusahaan dalam organisasi. Destiani menjelaskan tujuan dewan komisaris membentuk komite audit, yaitu: Memastikan bahwa laporan keuangan publik akurat dan mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum, memastikan efektivitas pengendalian internal perusahaan, Menanggapi klaim penyimpangan yang signifikan di perbankan sektor dan dampak hukum potensial mereka, memilih auditor eksternal disarankan.

Komite Audit berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris menjadi intermediaries atau penghubung antara Dewan Komisaris dan Auditor Eksternal perusahaan publik. Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit poin (3) menyebutkan bahwa persyaratan keanggotaan Komite Audit antara lain, sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
  2. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
  4. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
  5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
  6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
  7. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik, dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris, kecuali Komisaris Independen.
  8. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
    - A. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama emiten atau perusahaan publik.
    - B. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha emiten atau perusahaan publik.
- Pedoman Good Corporate Governance memaparkan bahwa peran Komite Audit yaitu:
- a. Mendorong terbentuknya struktur pengawasan intern yang memadai.
  - b. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan.



- c. Mengkaji ruang lingkup dan ketetapan eksternal audit kewajaran biaya eksternal audit, serta kemandirian dan objektivitas eksternal auditor
- d. Mempersiapkan surat iuran tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit. Hal ini terkait dengan prinsip pertanggungjawaban (Responsibility).

### 3. Manajemen Laba

Warmadewa (2010) menyatakan bahwa 'Manajemen laba adalah proses mengambil langkah-langkah sadar untuk mencapai tingkat laba yang diinginkan dalam batas-batas prinsip akuntansi yang berlaku umum'.

Menurut Scott dalam Antonia (2008), manajemen laba adalah perilaku seorang manajer yang menerapkan teknik akuntansi untuk melaporkan keuntungan yang dapat memaksimalkan keuntungan individu atau perusahaan. Scott juga mendefinisikan manajemen pendapatan sebagai *intervensi* manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan eksternal untuk menambah atau mengurangi laba buku menurut laba.

Schipper dalam Antonia (2008) berpendapat bahwa manajemen laba merupakan *intervensi* dalam proses pelaporan keuangan eksternal untuk keuntungan pribadi. Manajemen pendapatan melibatkan manajemen membuat penilaian tentang pelaporan keuangan dan struktur transaksi dan mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan pemegang saham tentang kinerja ekonomi entitas atau untuk mengkompromikan kesepakatan dengan angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Terjadi ketika hal itu mempengaruhi hasil.

Dari beberapa definisi di atas, tampak bahwa manajemen laba, sejauh diizinkan oleh standar akuntansi, memanipulasi laporan keuangan untuk memberikan informasi yang menyesatkan kepada pengguna laporan keuangan untuk kepentingan manajemen. Dapat disimpulkan bahwa ini adalah kesengajaan usaha oleh manajemen untuk Selain itu, manajemen pendapatan dipandang sebagai aktivitas yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan.

Menurut Setiawati dan Na'im, ada berbagai teknik dan pola dalam pengelolaan pendapatan, antara lain:

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui *judgment* (perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.

## 2. Mengubah metode akuntansi

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh:

Merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

## 3. Pindah periode biaya atau pendapatan.

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain:

Mempercepat/Menunda pengeluaran R&D ke periode fiskal berikutnya, Mempercepat/Menunda biaya periklanan ke periode fiskal berikutnya, Produk ke pelanggan Penjualan aset yang tidak terpakai untuk mempercepat/menunda pengiriman. Adanya praktik ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap pelaporan keuangan eksternal dan menghambat kemampuan pasar modal untuk mengalir. Praktek ini juga dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

Yield management juga merugikan investor karena tidak mendapatkan informasi yang benar tentang keadaan keuangan perusahaan. Dalam kasus seperti itu, diperlukan mekanisme kontrol untuk mendamaikan kepentingan yang bertentangan antara manajemen dan investor, yang disebut tata kelola perusahaan. Ketika kepentingan manaje vmen dan pemilik diselaraskan, perusahaan berkinerja lebih baik dan menciptakan nilai tambah bagi pemegang sahamnya. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik dianggap perlu.

## **B. Keterkaitan Antar Variabel**

### **1. Hubungan Pengungkapan *Sustainability Reporting* dengan Manajemen**

#### **Laba**

Pelaporan laporan berkelanjutan akan dapat meningkatkan citra baik dari masyarakat atau investor, serta dapat mewujudkan transparansi dari segala kinerja perusahaan. Semakin baik kualitas laporan kerbelanjutan yang diterbitkan oleh

perusahaan maka pertumbuhan harga saham dalam perusahaan juga dapat meningkat. Informasi yang tercantum dalam laporan keberkelanjutan dimensi ekonomi dapat menyakinkan potensi sumber daya modal yang kompetitif dengan tingkat risiko yang rendah pada stakeholder. Manajemen laba akan terjadi jika perusahaan tidak memiliki komitmen dan tanggung jawab kepada komunitasnya. Pengungkapan laporan berkelanjutan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap stakeholders dan regulasi. Hasil penelitian Rina Trisnawati (2016) menunjukkan bahwa semua dimensi pelaporan keberlanjutan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

## **2. Hubungan Komite Audit dengan Manajemen Laba**

Dalam penelitian ini Corporate Governance diprosikan oleh Komite Audit. Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan (Nasution dan Doddy, 2007). Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, dan keadilan untuk semua stakeholder sehingga keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan karena dapat mengurangi terjadinya manajemen laba. Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2008), komite audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris terutama yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan. Komite audit bertugas mendukung fungsi pengawasan terhadap manajemen, hal ini dilakukan supaya manajemen tidak bersifat oportunistik. Semakin banyaknya anggota komite audit akan meningkatkan kinerja komite audit tersebut sehingga tingkat pengendalian manajemen laba juga semakin baik.

### **C. Penelitian Terdahulu**

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti mempergunakan penelitian terdahulu untuk dijadikan dasar dalam penelitian. Penelitian terdahulu memudahkan peneliti dalam menentukan langkah – langkah yang lebih sistematis dari segi teori dan juga dari segi konsep.

Peneliti menggunakan penelitian sebelumnya untuk dijadikan acuan serta referensi untuk memudahkan dalam membuat penelitian ini. Peneliti telah menganalisa 10 (Sepuluh) penelitian terdahulu yang berkaitan dalam bentuk metode penelitiannya.



**Tabel. Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Penulis	Tahun	Variabel	Hasil
1.	Pengaruh Pengungkapan <i>Sustainability Reporting</i> Terhadap Manajemen Laba Dengan <i>Corporate Governance</i> Sebagai Variable Pemoderasi	Wiri Astuti	2021	Variabel Independen yang digunakan: <i>Sustainability Reporting</i> (X1) dan <i>Corporate Governance</i> (X2) Variabel Pemoderasi dan yang digunakan: Manajemen Laba (Y)	<p>a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuantitas pengungkapan <i>sustainability reporting</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.</p> <p>b. Sedangkan kualitas pengungkapan <i>sustainability report</i> berpengaruh positif terhadap manajemen laba.</p> <p>c. Analisis juga menunjukkan bahwa komite audit memiliki hubungan dengan kuantitas pengungkapan pelaporan keberlanjutan dan manajemen laba. Komite audit memperlemah hubungan antara luasnya pengungkapan pelaporan keberlanjutan dan manajemen laba.</p>

2.	<p><i>Pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Terhadap Manajemen</i></p>	<p>1)Novy Sulistyoningih 2) Nur Fadrijh Asyik</p>	2019	<p>Variabel independen yang digunakan: <i>Good Corporate (X1)</i> dan Kinerja Lingkungan (X2)</p> <p>Variabel dependen yang digunakan: Manajemen Laba(Y)</p>	<p>a. kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, Komite audit dan return on assets berpengaruh terhadap manajemen laba</p> <p>b. Sedangkan uji menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba.</p> <p>c. Variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Variabel ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dengan.</p> <p>d. Variabel Komite audit</p>
----	--	---	------	--	---





					tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Variabel <i>return on assets</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
3.	Analisis Kinerja Keuangan dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba	1)Dias Adi Dharma , 2)Prisila Damayanti 3)Djunaidy	2019	Variabel independen yang digunakan: Kinerja Keuangan (X1) dan <i>Corporate Governance</i> (X2)  Variabel dependen yang digunakan: Manajemen Laba(Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>profitabilitas</i> berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan <i>leverage</i> , komite audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

4.	Pengaruh Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> , <i>Corporate Social</i> dan Karakteristik Perusahaan Terhadap <i>Financial Performance</i>	1) Deni Hamdani 2)Yunianti Nuraisah	2017	Variabel independen yang digunakan: Laporan Berkelanjutan(X1), Tata Kelola Perusahaan(X2), <i>Profitabilitas</i> (X3) Variabel dependen yang digunakan: Nilai Perusahaan(Y).	(1)Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan ditunjukkan dengan adanya prediksi peningkatan nilai regresi yang diproyeksikan pada ROA dan ROE. (2)Pengungkapan <i>Corporate social responsibility</i> memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan ditunjukkan dengan adanya prediksi peningkatan nilai regresi yang diproyeksikan pada ROA dan ROE. (3)Pengungkapan Karakteristik Perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan ditunjukkan dengan adanya prediksi peningkatan nilai regresi yang diproyeksikan pada ROA dan ROE.
5.	Analisis Kinerja Keuangan Corporate Governance Terhadap Managemnt Laba	1)Dias Adi Dharma , 2)Prisila Damayanti3)Djunaidy	2021	Variabel independen yang digunakan: Kinerja Keuangan(X1) <i>Corporate Governance</i> (X2)  Variabel dependen yang digunakan: Manajemen Laba (Y1)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>profitabilitas</i> berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan <i>leverage</i> , komite audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

6.	<p><i>Sustainability Report</i> dan Manajemen Laba Dengan <i>Good Corporate Governance Quality</i> Sebagai Pemoderasi</p>	<p>1) I Gusti Agung Ayu Prabani Dwi Kepakisan</p> <p>2) I Gusti Ayu Nyoman Budiasih2</p>	2022	<p>Variabel independen yang digunakan: Sustainability Reporting(X1) Manajemen Laba(X2)</p> <p>Variabel moderasi yang digunakan: GCG(Y)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan <i>sustainability report</i> berpengaruh negatif pada manajemen laba dan <i>Good Corporate Governance Quality</i> memperkuat pengaruh negatif <i>sustainability report</i> pada manajemen laba. Hal ini didasari oleh teori Legitimasi dan Keagenan, dimana terjadinya manajemen laba dapat dipengaruhi oleh <i>Good Corporate Governance Quality</i>. Semakin tinggi tingkat <i>Good Corporate Governance Quality</i> yang dicapai perusahaan maka dapat menekan terjadinya manajemen laba</p>
----	---	--	------	--	---



7.	<p>Pengaruh Manajemen Pengungkapan <i>Board</i> Keberlanjutan sebagai Variabel Terhadap Laba dengan <i>Capital</i> Pemoderasi</p>	<p>1) Nadhifa Aisha Putri 2) Prof. Dr. Indra Wijaya Kusuma</p>	2021	<p>Variabel independen yang digunakan: Laporan Keberlanjutan (X1), Variabel dependen yang digunakan: Manajemen Laba (Y) Variable Moderasi: <i>Board Capital</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan dapat meminimalkan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen. Akan tetapi, dewan komisaris yang memiliki <i>board capital</i> yang tinggi dapat meningkatkan tingkat praktik manajemen laba. Hal ini berarti bahwa <i>board capital</i> digunakan oleh dewan komisaris untuk menyembunyikan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen.</p>
J8.	<p>Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba Pada Industri Perbankan Di Bursa Efek Indonesia</p>	Agung Wicaksono	2016	<p>Variabel Independen: Pengaruh <i>Corporate Governance</i> (X) Variabel Dependen: Terhadap Manajemen Laba Pada Industri Perbankan Di Bursa Efek Indonesia (Y)</p>	<p>Diperoleh dari hasil bahwa mekanisme tata Kelola yaitu komposisi dan ukuran dewan komisaris, serta keberadaan komite audit mempengaruhi manajemen laba perusahaan bank umum yang terdeteksi dengan menggunakan model akrual spesifik dari Bayer dan Engel (1996). Hasil ini berarti mekanisme yang dilakukan oleh perusahaan telah berhasil meminimalkan praktik manajemen laba.</p>

9	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Leverage</i> Terhadap Manajemen Laba	1)Fiorent Asitalia 2)Ita Trisnawati	2017	Variabel Independen: Pengaruh <i>Corporate Governance</i> (X1) <i>Leverage</i> (X2)  Variable Dependent: Terhadap Manajemen Laba (Y1)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh komponen tata kelola perusahaan (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, <i>board size</i> , ukuran komite audit dan proporsi dewan komisaris independen) tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan leverage berpengaruh negative terhadap manajemen laba.
---	---	--	------	--	---



10	<i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Perusahaan	1)Devi Dwi Rahma wardani 2)Muslichah	2020	Variable Independent: <i>Corporate Social Responsibility</i> (X1) Variable Dependent: Manajemen Laba (Y1) Kinerja Perusahaan (Y2)	Hasil penelitian menunjukkan empat temuan penting: (1) pengaruh CSR terhadap kinerja perusahaan adalah positif dan signifikan (2) CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba, (3) manajemen laba tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (4) manajemen laba tidak dapat memediasi pengaruh CSR terhadap kinerja perusahaan.
----	---	---	------	---	---

Sumber: Data diperoleh dari penelitian terdahulu

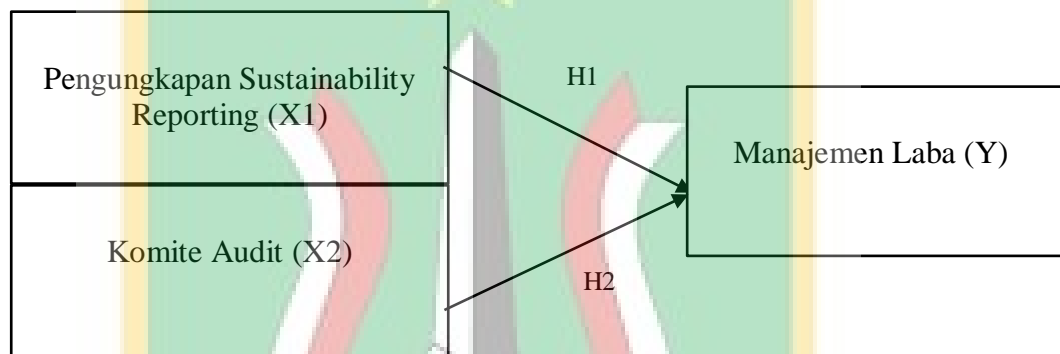


#### D. Kerangka Analisis

Kerangka analisis adalah model yang menjelaskan sebuah teori hubungan dengan factor - faktor yang penting untuk diketahui dalam suatu masalah tertentu.

Kerangka analisis secara teori menghubungkan antara variabel independen dan juga variabel dependen.

Penelitian ini memiliki satu variabel terikat (*dependen*) dan dua variabel bebas (*independen*). Variabel terikat (*dependen*) yaitu Manajemen Laba (Y), dan variabel bebas (*independen*) yaitu Pengaruh Pengungkapan Sustainability Reporting (X1) dan Komite Audit (X2).



Gambar 1. Kerangka Analisis

#### E. Hipotesis

##### 1. Pengaruh Pengungkapan Sustainability Reporting Terhadap Manajemen Laba

*Sustainability reporting* merupakan publikasi informasi yang mencerminkan kinerja organisasi dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (The Association of Chartered Certified Accountants, 2013). Menurut Ballou et al. (2006), sustainability reporting digunakan oleh perusahaan sebagai cara menjawab permintaan stakeholders terhadap informasi kinerja perusahaan dan manajemen risiko. Laporan keberlanjutan semakin menjadi trend dan kebutuhan bagi perusahaan untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial dan lingkungannya sekaligus kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan (Chariri, 2009).

Pelaporan laporan berkelanjutan akan dapat meningkatkan citra baik dari masyarakat atau investor, serta dapat mewujudkan transparansi dari segala kinerja perusahaan. Semakin baik kualitas laporan kerbelanjutan yang diterbitkan oleh perusahaan maka pertumbuhan harga saham dalam perusahaan juga dapat meningkat. Informasi yang tercantum dalam laporan keberkelanjutan dimensi ekonomi dapat menyakinkan potensi sumber daya modal yang kompetitif dengan tingkat risiko yang rendah pada *stakeholder*. Manajemen laba akan terjadi jika perusahaan tidak memiliki komitmen dan tanggung jawab kepada komunitasnya. Pengungkapan laporan berkelanjutan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap stakeholders dan regulasi. Hasil penelitian Rina Trisnawati (2016) menunjukkan bahwa semua dimensi pelaporan keberlanjutan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Melalui pengungkapan sustainability reporting yang dilakukan perusahaan baik secara kualitas dan kuantitas semakin tinggi yang akan mendapat kepercayaan masyarakat dan stakeholder maka dapat menurunkan tingkat manajemen laba.

Pendapat tersebut sejalan dengan Wiri (2021) bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial cenderung berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. . Perusahaan dengan tingkat pengungkapan sustainability report yang baik akan jarang melakukan praktik manajemen laba. Ketika sebuah perusahaan menerbitkan sustainability report, perusahaan tersebut akan memperoleh citra atau penilaian yang baik dari masyarakat luas. Citra yang baik tersebut tidak mudah didapatkan, oleh karena itu manajer akan berperilaku etis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Pengungkapan sustainability reporting berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.**

## **2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba**

*Corporate governance* dapat didefinisikan sebagai mekanisme dan proses tata kelola perusahaan dimana sebuah perusahaan dijalankan untuk meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham dan pemangku kepentingan

perusahaan lainnya (Ridwan, 2007). *Corporate governance* juga memberikan struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Wisnumurti, 2010). Andri dan Hanung (2007) dalam Anggraeni & Hadiprajitno (2013: 1) mengatakan terdapat beberapa mekanisme *Corporate Governance* (CG) yang dapat meminimalisir terjadinya konflik keagenan manajemen laba, salah satunya yaitu melalui komite audit.

Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan (Nasution dan Doddy, 2007). Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, dan keadilan untuk semua stakeholder sehingga keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan karena dapat mengurangi terjadinya manajemen laba. Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2008), komite audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris terutama yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan.

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) menegaskan keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme checks and balances, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan optimum kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya (Perdana, 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yendrawati dan Yuanifa (2015), Marsha dan Ghozali (2017) menunjukkan hasil bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sehingga dengan adanya komite audit pada suatu perusahaan, peluang untuk melakukan tindakan manipulasi laporan keuangan maupun manajemen laba dapat dihindarkan. Semakin banyak jumlah rapat komite audit yang diadakan, maka akan mampu mengurangi tindakan manajemen laba .

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H2: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.**